

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PENYELARASAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAN POKDARLAT



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan ridho serta rahmat-Nya, sehingga pembuatan Laporan Kegiatan ini dapat diselesaikan atas kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

Bahwa pelaksanaan kegiatan Rapat Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengusung tema "Hasil Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan Outlook Anggaran Tahun 2019" yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Tanjung Pendam Lantai 2 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai bentuk laporan yang akuntabel atas pelaksanaan kegiatan ini, kami susun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah digunakan dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen yang telah bekerja sama atas pelaksanaan rapat pimpinan ini terlebih khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini belumlah sempurna, untuk itu kami sangat membutuhkan saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini agar dapat berguna dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Pangkalpinang, November 2019

Mengetahui
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,



M. HARIS AR, AP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197606201995021001

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYELARASAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Program : Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah

Kegiatan : Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 29.325.000,-
Keluaran	Jumlah pertemuan Gubernur dan Instansi Vertikal	1 kali pertemuan
Hasil	Terwujudnya hubungan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal	80%

A. Latar Belakang

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk kesatuan yang ditampung kemajemukan bangsa dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan semangat otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan prinsip negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan nasional dan tidak pada daerah, oleh karena itu seluas apapun otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah. Dengan demikian kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Untuk itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota diatur dalam Undang-Undang agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjamin adanya prinsip keadilan dan keselarasan.

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu digaris bawahi bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Guna menjamin keselarasan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program pengembangan kerja sama pemerintah daerah dengan kegiatan penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat.

Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Instansi Vertikal serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselenggara dengan baik sehingga pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik sejalan dengan arah kebijakan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Membangun sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Instansi Vertikal serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menyelaraskan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Pusat melalui Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Harmonisasi hubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Instansi Vertikal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terselenggara dengan baik.

9. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung;
10. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan;
11. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
12. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
14. Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Ketua STAIN SAS Bangka Belitung;
18. Rektor Universitas Bangka Belitung;
19. Kepala Basarnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Direktur Politeknik Kesehatan Pangkalpinang;
21. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
22. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
23. Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
24. Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
25. Kepala KSOP Pangkalbalam
26. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang;
27. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
28. Ketua LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
29. Kepala RRI Sungailiat;
30. Kepala LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung;
31. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
32. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
33. Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
34. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

35. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
36. Kasubbag Undangan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
37. Kasubbag Fasilitas Instansi Vertikal Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
38. Kasubbag Kerja Sama Antar Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
39. Kasubbag Kerja Sama Swasta dan Luar Negeri Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
40. Kasubbag Fasilitas Kepala Daerah dan Legislatif Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
41. Kasubbag Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
42. Kasubbag Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan;
43. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Staf pengelola kegiatan:

1. Emarylis, SE
2. Firdaus Darmanto
3. Donna Natalia, A. Md

b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : M. Haris AR, AP., MH

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ihsan, SE

3. Uraian Kegiatan

a. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak dan penggandaan dialokasikan untuk biaya cetak blangko kuitansi, blangko SSP, fotokopi administrasi kegiatan, fotokopi bahan rapat serta penjiilidan laporan kegiatan

b. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dialokasikan untuk biaya sewa kendaraan roda 4 untuk pelaksanaan rapat pada Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat dialokasikan untuk biaya makanan dan minuman selama rapat Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Moderator

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Moderator dialokasikan untuk biaya honorarium narasumber dan moderator pada Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah. Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Narasumber kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah direncanakan adalah :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Kapolda Kepulauan Bangka Belitung;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung;
- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung;
- Kepala Kantor BPKP Perwakilan Bangka Belitung;
- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELARASAN PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019

No	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
		J	Fb	Ma	AP	Me	Jn	Jl	Ag	S	O	N	D
1.	Persiapan												
	a. Persiapan administrasi												
	b. Konsultasi ke pusat												
2.	Pelaksanaan Rapat												
3.	Penyelesaian Administrasi												
4.	Penyusunan Laporan												

Biaya yang dibutuhkan

Rekapitulasi Anggaran :

KODE REKENING				URAIAN	VOL	SAT	HG SAT	JUMLAH
2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				29.325.000
2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				3.300.000
2	2	06	01	Belanja Cetak				50.000
				- Cetak Blangko Kwitansi	1	buku	50.000	50.000
2	2	06	02	Belanja Penggandaan				2.250.000
				Belanja Fotocopy				
				- Fotocopy administrasi kegiatan	5000	Lbr	300	1.500.000
				- Fotocopy bahan rapat	2.500	Lbr	300	750.000
2	2	06	03	Belanja Perjilidan				1.000.000
				Belanja Perjilidan				1.000.000
				- Jilid Laporan Kegiatan	2	paket		1.000.000
2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000
2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				4.000.000
				Belanja sewa sarana mobilitas darat				4.000.000
				- Sewa Kendaraan Roda 4 (1 unit x 2 hari)	2	OH	500.000	1.000.000
2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman				5.625.000
				Rapat penyelarasan program pemerintah daerah dengan program instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				5.625.000
				- makan dan minum prasmanan peserta rapat, pendamping rapat dan panitia	1	paket	5.625.000	5.625.000
2	2	28		Belanja Jasa Tenaga				19.400.000
				Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator				
2	2	28	01	Belanja Jasa Tenaga				19.400.000
				Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator				
				Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Moderator				
				- Narasumber tenaga ahli daerah (1 orgx2jamx1kali)	2	OJ	1.700.000	3.400.000
				- Narasumber tenaga ahli daerah Ess II (8 orgx2jamx1kali)	16	OJ	1.000.000	16.000.000

Pangkalpinang, Januari 2019
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

M. HADIS AD. AD. MU



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SAMBUTAN DAN MATERI

Pada Acara

**RAPAT PENYELARASAN PROGRAM PEMERINTAH
DAERAH DAN PUSAT
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

Pangkalpinang, 20 Maret 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
- Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung atau Mewakili;
- Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Yth. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung;
- Yth. Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

**NANAM SAHANG DI KAMPUNG SERDANG
SAHANG DITANAM MODAL KE MEKKAH
DENGAN MENGUCAP SELAMAT DATANG
SEMOGA RAPAT MEMBAWA BERKAH**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkesempatan hadir pada acara Rapat Penyelerasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihiwasalam, semoga segala pedoman yang telah beliau tinggalkan senantiasa membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala.

Terlebih dahulu, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan para peserta rapat yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada kesempatan ini.

Semoga melalui pelaksanaan rapat ini dapat mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Peserta Rapat yang saya hormati,

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah menempatkan Gubernur pada posisi strategis yaitu sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat.

Sebagai Kepala Daerah, Gubernur melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan urusan yang telah didesentralisasikan, sedangkan sebagai wakil pemerintah pusat gubernur membantu Presiden untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Kabupaten/Kota.

Dalam hal peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018, tentu saja diikuti dengan meningkatnya kinerja gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Oleh karena itu diperlukan data dan informasi yang memberikan gambaran kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota,

- c. Memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, Gubernur juga memiliki tugas dan wewenang dalam menyelaraskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta memberi rekomendasi kepada Pemerintah atas usulan DAK bagi Kabupaten/Kota di wilayahnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 telah memberikan arah bagi terwujudnya Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, salah satu harapan besar dengan semakin kuatnya kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah terciptanya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dengan mengacu pada visi dan misi presiden yang tertuang dalam Nawacita.

Penguatan fungsi Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat, dimana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebaliknya, Bupati/Walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota.

Penguatan fungsi Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi sangat strategis sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Dapat dipastikan bahwa peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sangat strategis dan signifikan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu dalam Rapat Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat pada hari ini, menjadi sangat penting bagi kita untuk melakukan dan mengambil tindakan yang diperlukan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun ini dan upaya-upaya kita dalam memperbaiki dan mendorong pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2020 agar menjadi lebih baik.

Tema rapat kita kali ini sangat tepat yaitu "Hasil Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan Outlook Anggaran 2020", mari kita jadikan rapat ini sebagai wahana untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman agar kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Negeri kita ini dapat diatasi dengan baik.

Kinerja Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung Tahun 2018 menurut pengeluaran, di bawah Pertumbuhan Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 4,45% sedangkan rata pertumbuhan se-Sumatera sebesar 4,54%. Pertumbuhan sebesar 4,45% didorong oleh konsumsi rumah tangga (PMKT), ini masih dianggap stabil.

Sedangkan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung Tahun 2018 didorong oleh Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yaitu:

1. Pertumbuhan sektor pertanian 5,49%
2. Pertumbuhan sektor pertambangan -1,08%
3. Pertumbuhan sektor industri pengolahan 4,04%

4. Pertumbuhan sektor perdagangan 2,65%

Pertumbuhan ekspor melambat di Tahun 2018 sejalan dengan adanya pelambatan nilai ekspor timah, Pangsa ekspor timah di Tahun 2018 mencapai 76,62%, sedangkan untuk Impor Bangka Belitung 2018 Menguat dibandingkan tahun sebelumnya.

Seiring dengan melambatnya ekspor dan meningkatnya impor, surplus neraca perdagangan 2018 diperkirakan akan turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Neraca perdagangan Bangka Belitung tercatat masih mengalami surplus hingga 2018 sebesar USD 1.640,80 juta. Surplus neraca perdagangan tahun 2018, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai USD 1.728 juta, sejalan dengan menurunnya kinerja ekspor timah.

Tingkat inflasi tahunan Bangka Belitung pada Februari 2019 tercatat sebesar 3,29% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,25% (yoy). Sedangkan Inflasi Tahunan Bangka Belitung sampai dengan Februari 2019 berada diatas tingkat inflasi Nasional akan tetapi masih terkendali dengan inflasi kalender sebesar 0,44% (ytd). Inflasi Februari masih berada pada sasaran inflasi Nasional yaitu $3,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Bangka Belitung pada Februari 2019 disumbang oleh kelompok transportasi dengan tarif angkutan udara yang menjadi penyumbang utama, tetapi tingkat inflasi tersebut di Bangka Belitung dapat dikatakan masih terkendali.

Hadirin yang saya hormati,

Postur APBN Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat kita lihat dari realisasi pendapatan TA 2018 secara nominal naik **Rp 27,6 miliar** dari realisasi TA 2017, sedangkan untuk realisasi Belanja K/L TA 2018 lebih tinggi **2,2%** jika dibandingkan capaian TA 2017. Alokasi Belanja K/L terbesar adalah Belanja Barang, namun tingkat penyerapannya hanya mencapai 90,64%. Rendahnya capaian tersebut

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Rapat Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 kami nyatakan dibuka secara resmi.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing kita semua.
Terima kasih.

**KE KAMPUNG NAMANG BELI KULAT
KULAT DILEMPAH CAMPUR PATI KARA
PEMBANGUNAN DAERAH MARI DIPERKUAT
RAKYAT MAKMUR HIDUP SEJAHTERA**

*Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

H. ERZALDI ROSMAN